



Buletin Parlementaria

Nomor 1129/II/XI/2020 • November 2020



Generasi Z Berperan Penting Bagi Indonesia



9 772614 339005



6 RRI Perlu
Aktif Kokohkan
Nilai Kebangsaan



14 DPR Tekankan Penerapan
Protokol Kesehatan
Sektor Pariwisata

Generasi Z Berperan Penting Bagi Indonesia

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meyakini keberlangsungan Indonesia di masa depan tergantung pada kualitas generasi Z alias para remajanya. Menurutnya, generasi Z ini adalah generasi yang akan mengubah Indonesia. Dalam alfabet, huruf Z memang dianggap huruf yang terakhir, namun Puan justru melihat generasi Z sebagai titik awal perjalanan baru Bangsa Indonesia ke depan.

“Para remaja yang saat ini berusia 16-17 tahun akan berada di puncak-puncaknya masa usia produktif 30-an akhir atau 40-an awal saat Indonesia berusia 100 tahun nanti. Insya Allah, di tahun 2045 nanti, di antara para peserta Parlemen Remaja ini mungkin sudah ada yang menjadi Anggota DPR, memiliki perusahaan sendiri, jadi ilmuwan, ahli teknologi, atau bahkan Menteri. Artinya, adik-adik inilah yang akan mengambil keputusan penting yang akan membentuk Indonesia ketika negara kita sudah berusia lebih dari 1 abad,” ucap Puan saat memberikan sambutan virtual dalam acara pembukaan kegiatan Parlemen Remaja Tahun 2020 di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (2/11).

Menurut Puan, keberlangsungan masa depan Indonesia ini akan terwujud saat para remaja berperan aktif menjaga identitas sebagai bangsa Indonesia. “Karena adik-adik ini adalah generasi yang penting bagi masa depan Indonesia, saya ingin menyampaikan harapan supaya semua berperan aktif menjaga identitas kita sebagai bangsa Indonesia,” ucap Puan.

“Salah satu yang utama adalah



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Eno/JK

dengan menjaga dan menerapkan Pancasila yang merupakan ideologi bangsa kita. Bukan hanya menghafal Pancasila, tetapi benar-benar menerapkannya.” kata perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Adapun Parlemen Remaja sendiri merupakan kegiatan tahunan DPR RI dalam rangka memeriahkan Hari Demokrasi Internasional yang jatuh pada tanggal 15 September setiap tahunnya. Untuk edisi 2020, Parlemen Remaja yang digelar secara virtual dan diikuti 134 siswa-siswi SMU/SLTA/SMK/Madrasah Aliyah dan sederajat dari 80 daerah pemilihan (dapil) ini berlangsung pada 2-6 November dengan tema “Gotong

Royong Mengatasi Pandemi Covid-19. Optimis Kita Bisa!”.

Menurut politisi PDI-Perjuangan itu, sebagaimana tema kegiatan Parlemen Remaja, peran generasi Z juga tak kalah penting dibanding kelompok masyarakat Indonesia lainnya dalam mengatasi penyebaran virus Corona di Indonesia.

“Gotong royong sangat dibutuhkan agar kita bisa melewati pandemi virus Corona ini. Kita harus saling mengingatkan sesama teman, ke orang tua kita, supaya benar-benar menjaga protokol kesehatan,” tuturnya. Sebagai Ketua DPR RI, Puan juga menyampaikan, suara generasi Z tetap dianggap penting oleh lembaga yang dipimpinnya. ■ pun/sf

DPR Bahas Kerja Sama Pertahanan-Imigrasi dengan Parlemen Ukraina

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengatakan, DPR RI dan Parlemen Ukraina (Verkhovna Rada) sepakat memperkuat kerja sama bilateral, khususnya di bidang pertahanan dan keimigrasian antara Indonesia dan Ukraina. Hal itu dikemukakannya dalam kunjungan bilateral delegasi DPR RI ke Parlemen Ukraina, dalam rangka kunjungan balasan Parlemen Ukraina ke Indonesia.

Delegasi DPR RI diterima langsung *Deputy Chairperson Verkhovna Rada*, Olena Kondratiuk. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi, Anggota Komisi XI DPR RI Putri Anetta Komaruddin dan Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

Delegasi DPR RI mengadakan pertemuan dengan Pimpinan Parlemen Ukraina serta pertemuan dengan *Inter-Parliamentary Friendship Group of*

Indonesia - Ukraine. Kedua Parlemen menekankan pentingnya peningkatan hubungan Indonesia - Ukraina di berbagai bidang. Dalam kesempatan tersebut, Azis juga menyampaikan hal terkait keimigrasian. Ia meminta kepada pimpinan Parlemen Ukraina agar pemerintah mereka dapat membebaskan visa bagi Warga Negara Indonesia (WNI).

"Indonesia-Ukraina memiliki hubungan bilateral yang baik dalam hal kerja sama pertahanan yang perlu terus ditingkatkan, juga dalam ekonomi agar defisit perdagangan dapat teratasi segera, dan juga bebas visa kunjungan untuk WNI, sebagaimana Indonesia membebaskan visa kepada Ukraine," kata politisi Partai Golkar itu.

Azis juga memuji pelaksanaan Pilkada di Ukraina. Menurutnya, Pilkada di Ukraina berlangsung sukses, meskipun digelar di tengah pandemi virus Covid-19. "Suatu keberhasilan yang luar biasa dan menjadi optimisme bagi penyelenggaraan pilkada serentak di Indonesia pada bulan Desember nanti," ungkap Azis. ■ ann/sf



Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin memimpin delegasi DPR RI ke Parlemen Ukraina. Foto: Ist/MAN



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos, M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arininda, S.Sos. Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P. S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Irandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Purntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Rihan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indrianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moernoponi, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie.

ANALIS MEDIA

Supian, S.E. Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoyowati

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salimah

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E. Barliansyah, Fathurahman

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

PHOTOGRAFER ART

Friederick Munchen

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna, Handhal Dwi Akbar

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Siaran RRI Medan Diharapkan Tetap Relevan Sepanjang Zaman

Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon berharap agar siaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI), khususnya RRI Medan, Sumatera Utara, tetap relevan di sepanjang zaman. Selain itu, politisi Fraksi Partai Gerindra itu mendorong LPP RRI terus merevitalisasi dirinya, sehingga tetap eksis dan disukai masyarakat.

“Saya berharap bagaimana menjadikan RRI baik pusat maupun daerah tetap relevan dan menarik perhatian masyarakat terutama dari generasi muda. Kemudian, kita juga ingin RRI menjadi siaran seperti BBC di London yang terus merevitalisasi dirinya, sehingga bisa di atas radio-radio swasta,” kata Fadli saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI dengan jajaran LPP RRI Medan, di Sumut, Senin (26/10).

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPR RI Darizal Basir mengatakan, dahulu siaran radio sangat digemari. Namun karena perkembangan teknologi digital dengan hadirnya televisi, sudah terjadi pergeseran minat terhadap radio. “Pernahkah kita evaluasi sejauh mana animo masyarakat mau mendengar radio ini, jangan hanya menyiarkan, tapi orang tidak mendengar, cuma buang *duit* saja,” kritik politisi Partai Demokrat itu.

Menurut Darizal, perlu pemetaan wilayah jangkauan siaran dan wilayah yang banyak peminat untuk mendengarkan radio. “Terus terang saya pribadi siaran RRI maupun TVRI sudah jarang mengikuti karena banyak *channel* lain yang lebih efektif dan yang lebih oke. Apalagi (dalam paparan) ada program siaran RRI



Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon. Foto: Jaka/JK

”

SAYA BERHARAP BAGAIMANA MENJADIKAN RRI BAIK PUSAT MAUPUN DAERAH TETAP RELEVAN DAN MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT TERUTAMA DARI GENERASI MUDA

untuk kawula muda, padahal anak muda lebih banyak menyukai visual,” terang Darizal.

Sementara itu, Direktur Keuangan LPP RRI Hari Sudaryanto pada laporannya kepada Komisi I DPR RI menyatakan, dalam upaya meningkatkan *rating* dan membuat siaran RRI tetap relevan, di kantor pusat telah dibuat kegiatan agenda *setting* merespon isu-isu aktual.

“Ini salah satu bentuk upaya yang dilakukan kami, dan hasil dari agenda *setting* ini akan langsung didistribusikan ke LPP RRI Daerah. Alhamdulillah ini sudah berjalan, tinggal bagaimana kegiatan rutinitas ini berjalan secara berkelanjutan,” jelas Hari lebih lanjut. ■ jk/sf

RRI Diminta **Sosialisasikan** Tahapan Pilkada Serentak

Peran radio dalam mensosialisasikan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dan tahapan protokol kesehatan dalam situasi dan kondisi pandemi saat ini tentunya sangatlah penting. Para kandidat Pilkada serentak dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar sebisa mungkin bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) untuk melakukan kampanye tahapan Pilkada secara virtual.

“Kami (Komisi I DPR RI) sudah melakukan diskusi dan dialog dengan RRI, tentunya ini harus ada kerja sama dengan jaringan demokrasi, misalnya Fisipol UGM, KPU dan Bawaslu yang mana untuk men-*develop* sebuah format (sosialisasi Pilkada) yang lebih *up to date*,” kata Anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (26/10).

”

KAMI MENGAPRESIASI DENGAN APA YANG SUDAH DILAKUKAN RRI DAN LAYANAN IKLAN MASYARAKAT INI PATUT DICONTOH DAERAH-DAERAH LAIN. ADAPUN MASUKAN LAIN DARI KAMI TERHADAP LPP RRI AGAR TETAP INDEPENDEN, NETRAL DAN BERPIHAK KEPADA PUBLIK

Anggota Komisi I DPR RI
Willy Aditya. Foto: Chasbi/JK



Politisi Fraksi Partai NasDem itu mengungkapkan, RRI diharapkan dapat memberikan informasi menambah wawasan dan edukasi ke masyarakat yang dapat menumbuhkan kecintaan kepada Tanah Air melalui iklan layanan masyarakat. “Kita dengar ada iklan layanan masyarakat, lebih baik ini berisi apa yang telah RRI lakukan, kemudian mensosialisasikan siapa kandidat (Pilkada) per wilayah, dan seperti apa proses pemberitaannya,” jelas Willy.

Legislator dapil Jawa Timur XI itu melanjutkan, kehadiran iklan layanan masyarakat tersebut agar hak konstitusi warga negara tidak hilang, sehingga proses demokrasi bisa terjamin. “Kami mengapresiasi dengan apa yang sudah dilakukan RRI dan layanan iklan masyarakat ini patut dicontoh daerah-daerah lain. Adapun masukan lain dari kami terhadap LPP RRI agar tetap independen, netral dan berpihak kepada publik,” tutup Wakil Ketua Baleg DPR RI itu. ■ cas/sf

RRI Perlu **Aktif** Kokohkan Nilai Kebangsaan

Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menekankan agar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) juga aktif mengambil peranan untuk memperkokoh nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, ini adalah salah satu peran besar bagi LPP RRI selain terus mensosialisasikan pentingnya menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 dan mensosialisasikan tahapan Pilkada serentak 2020.

Harapan itu diutarakan Jazuli saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI dengan jajaran LPP RRI Stasiun Denpasar, di Bali, Senin (26/10). Bukan hanya di Denpasar saja, Jazuli menginginkan RRI di daerah lain pun juga melakukan hal yang sama yaitu aktif mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan.

“Ke depan perlu bagaimana RRI ini mengkokohkan nilai-nilai demokrasi dan

toleransi. Ini bukan hanya berlaku di Denpasar tapi di seluruh Indonesia. Kita berharap sebagai lembaga penyiaran publik, RRI harus mengambil peran besar tentang mengkokohkan nilai-nilai dan prinsip berdemokrasi dan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucap Jazuli.

Ia meminta nilai-nilai kebangsaan itu dikemas sesuai dengan segmentasi pendengar LPP RRI agar informasinya tersampaikan dengan baik. “Kita dulu setiap pagi disuguhkan nilai-nilai Pancasila. Kita berharap itu juga berlaku tentu saja dengan dimodifikasi, karena sekarang zamannya sudah berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Generasinya juga berbeda,” terangnya.

Di samping itu, Ketua Fraksi PKS ini juga meminta LPP RRI bekerja sama secara komprehensif dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyajikan pelajaran-pelajaran yang dibutuhkan oleh anak-anak Indonesia. Karena banyak orang tua yang merasa direpotkan oleh kuota internet saat akan mengakses pembelajaran jarak jauh (PJJ) saat pandemi Covid-19.

“Secara langsung saya mengapresiasi RRI Denpasar yang sudah mengambil peranan itu. Tetapi harus diperluas materi dan bidang studinya. Maka itu harus ada kerja sama dengan pihak-pihak terkait secara formal misal dengan Dinas Pendidikan supaya nanti ketika disiarkan semua anak bisa dengar. Ini sudah dilakukan oleh RRI Denpasar,” pungkasnya. ■ es

Anggota Komisi I DPR RI
Jazuli Juwaini. Foto: Eрман/JK



Hukuman Terhadap Pelaku Kekerasan Perempuan dan Anak Belum Beri Efek Jera



Anggota Komisi III DPR RI Ary Egahni Ben Bahat. Foto: Singgih/JK

Anggota Komisi III DPR RI Ary Egahni Ben Bahat menyampaikan keprihatinannya atas tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, penegak hukum harus lebih tahu akar masalahnya, yang telah menyebabkan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di NTT.

“Saya sebagai perempuan, tentunya sangat prihatin melihat data yang disampaikan Kapolda bahwa kasus kekerasan perempuan dan anak di NTT cukup tinggi, bahkan kasus-kasus ini banyak terjadi di lingkungan keluarga,”

ungkap Ary di sela-sela mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda NTT beserta jajaran di Mapolda NTT, Kupang, NTT, Senin (26/10).

“Saya melihat belum secara maksimal hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan perempuan dan anak, (karena belum) memberikan efek jera dengan begitu meningkatnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak ini,” ungkapnya. Menurut Ary, dari tahun 2017 banyak terjadi kasus kekerasan perempuan dan anak di NTT. Dari yang dilaporkan saja sudah cukup banyak, belum termasuk yang tidak dilaporkan kepada pihak berwajib.

”

SAYA MELIHAT BELUM SECARA MAKSIMAL HUKUMAN YANG DIBERIKAN KEPADA PELAKU KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK, (KARENA BELUM) MEMBERIKAN EFEK JERA DENGAN BEGITU MENINGKATNYA KASUS KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK INI

“Yang dilaporkan saja lebih dari 17.000 kasus, dan yang tidak dilaporkan juga jauh lebih banyak. Karena biasanya sebagian besar kasus kekerasan perempuan dan anak terjadi di lingkungan keluarga terdekat, ada dilakukan oleh orang jauh, namun presentasinya masih rendah,” analisa politisi Partai NasDem ini.

Legislator dapil Kalimantan Tengah ini berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual segera dibahas dan disahkan, sehingga ada payung hukum yang jelas dan kuat, sehingga pemerintah bisa mengintervensi jika kekerasan itu belum terlalu dalam. Sehingga tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang lebih dalam dan meningkat jumlahnya. ■ skr/sf

Komisi IV Serap Aspirasi Nelayan Pekalongan



Tim Kunker Komisi IV DPR RI berfoto bersama para nelayan di Pekalongan, Jawa Tengah. Foto: Oji/JK

Saat ini, para nelayan banyak yang mengeluhkan rumitnya birokrasi perizinan kapal untuk berlayar. Tak hanya itu, mereka juga sering terkendala dengan subsidi solar yang masih belum merata serta infrastruktur pelabuhan dan jalan yang rusak. Hal ini tentu saja membutuhkan perhatian yang lebih dari pemerintah agar kesejahteraan nelayan bisa meningkat.

Hal ini mengemuka saat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Hasan Aminuddin didampingi Wali Kota Pekalongan Saelany Mahfudz beserta jajaran meninjau Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (4/11).

Terkait birokrasi, kelompok nelayan di Pekalongan berharap adanya perampingan dokumen kapal yang saat ini mencapai 30 dokumen untuk kapal

ukuran 30 *Gross Ton* (GT). Tak hanya itu, dokumen tersebut harus diurus di instansi yang berbeda dengan masa berlaku berbeda-beda pula.

Disampaikan Hasan, aspirasi nelayan tentang rumitnya birokrasi sebetulnya sudah terjawab pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “UU tersebut telah menyederhanakan semua peraturan perundang-undangan. Penyederhanaan ini sebuah inovasi yang harus diapresiasi, tentunya di dalamnya (UU Cipta Kerja) ada kelebihan dan kekurangannya,” jelas Hasan.

Politisi Partai NasDem ini mengatakan bahwa kesan kampung nelayan yang identik dengan kumuh, penduduknya miskin, pendidikan rendah dan rawan kriminalitas perlahan harus dibenahi bersama oleh semua pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

“Melalui pertemuan (dengan nelayan dan pihak terkait) ini, kami bisa melakukan kroscek apa yang menjadi

kekurangan-kekurangan termasuk aspirasi para kelompok nelayan yang mengharapkan infrastruktur pendukung keberlangsungan mereka saat bekerja,” tandasnya. Ia berkomitmen agar daerah juga memperoleh tambahan anggaran APBN untuk pembangunan melalui program kerja kementerian terkait.

Pada kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) KKP TB Haeru Rahayu mengatakan terkait tindak lanjut keluhan nelayan yang sudah terjawab melalui UU Cipta Kerja, KKP telah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) agar permasalahan yang dialami nelayan ini segera terselesaikan.

“Oleh karena itu, dalam waktu dekat semua kepentingan nelayan, pembudi daya kelautan, dan perikanan akan dilayani hanya dalam satu pintu melalui KKP RI. Masa berlaku dokumen itu sudah dijadikan satu dan tertampung di kantor kami,” ucap Haeru. ■ oji/es

Komisi V Terima Audiensi DPRD Cilacap

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti menerima audiensi DPRD Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Cilacap Purwati. Dalam kunjungan itu, Pimpinan dan Anggota DPRD Cilacap berkonsultasi terkait mekanisme penataan infrastruktur dan mitigasi di titik yang rawan bencana.

“Hari ini kedatangan DPRD Cilacap, dalam hal ini lebih mengenai usulan tentang infrastruktur jalan maupun alur sungai jembatan mengingat akhir-akhir ini curah hujan cukup tinggi dan mulai dirasakan dampaknya,” ungkap Novita usai menerima kunjungan audiensi DPRD Cilacap, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (5/11).

Novita membenarkan bencana yang melanda Cilacap akhir-akhir ini dikarenakan tingginya curah hujan di penghujung tahun 2020. Banjir kerap menjadi bencana tahunan. Karena itu, lanjutnya, dibutuhkan solusi permanen mengendalikan banjir di alur sungai bersedimentasi tinggi. Ia mencontohkan, Sungai Kaliyasa di Cilacap yang sedimentasinya cukup cepat, meski sudah dilakukan normalisasi sungai.

“Namun (usulan penambahan anggaran) itu paling bisa kita usulkan di tahun berikutnya, karena anggaran untuk tahun depan sudah diketok. Apalagi, saat ini anggaran lebih banyak berfokus pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi,” jelas Anggota DPR RI dapil Jateng VIII yang meliputi Kabupaten Banyumas dan Cilacap itu.

Dia menambahkan, saat ini pemerintah pusat berfokus pada penanganan pemulihan ekonomi. Kendati demikian, pembangunan infrastruktur tidak ditinggalkan.

“Mengenai anggaran infrastruktur, pada tahun ini pemerintah sangat berfokus dan memberikan perhatian untuk penanganan Covid-19, tetapi mengenai anggaran infrastruktur juga tidak ditinggalkan begitu saja,” ujar Novita.

“Insya Allah beberapa solusi sudah mulai dibahas, dan mungkin akan dilaksanakan dalam program *multiyears*. Saya meminta data tertulis dari Kabupaten Cilacap dan dinas terkait permasalahan bantuan yang diperlukan Cilacap secara detail untuk dikomunikasikan dengan Kementerian PUPR agar dicarikan solusinya,” tutup Wakil Ketua BURT DPR RI itu. ■ [ann,mar/sf](#)



Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti bertukar cenderamata dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Cilacap. Foto: Runi/JK

Perbankan Syariah Potensi Berkembang Pesat



Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. Foto: Azka/JK

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar mencermati pengembangan bank syariah. Menurutnya, bank syariah masih berpotensi berkembang pesat, mengingat penduduk Indonesia mayoritas muslim yang merupakan pangsa pasar sangat besar. Nevi menemukan fenomena pangsa pasar bank syariah 1 tahun ke depan masih akan bertahan di bawah 7 persen.

Akibatnya, ekosistem yang masih tidak menguntungkan akan terus menyelimuti dunia perbankan syariah. “Perlu terobosan besar, yakni sebuah tindakan atau regulasi agar terjadi akselerasi industri perbankan, keuangan dan ekonomi syariah secara luas,” tutur Nevi dalam siaran pers yang

diterima **Parlementaria**, Jum’at (16/10).

Legislator dapil Sumatera Barat II ini menekankan, ada beberapa alternatif untuk memperkuat bank syariah. Salah satunya adalah *merger* bank syariah. Ia meyakini bahwa kebijakan *merger* ini akan berdampak pada efisiensi dan skala ekonomi. Akan tetapi, tambah Nevi, kebijakan *merger* juga tidak serta merta langsung meningkatkan pangsa pasar bank syariah di Tanah Air.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini menerangkan, kebijakan *merger* tetap menuntut kebijakan untuk memperbesar pangsa bank syariah. Potensi nilai total aset bank syariah hasil *merger* akan mencapai Rp 210,5 triliun. Skala ini akan mencapai pangsa 40 persen dari total seluruh aset bank syariah. Meski terlihat sudah besar, tapi tetap ini masih jauh di bawah aset lima bank nasional terbesar.

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini BRI memiliki aset Rp 1.287 triliun, Bank Mandiri Rp 1.131 triliun, Bank BCA Rp 916 triliun, Bank BNI Rp 788 triliun, dan Bank BTN Rp 306 triliun. Jadi, bank syariah hasil *merger* tetap perlu disuntik permodalan dan meningkatkan asetnya lebih besar agar mampu bersaing dengan bank umum papan atas tersebut.

“Saya mengharapkan, Pemerintah melalui Kementerian BUMN, dapat mewujudkan sebuah bank syariah yang masuk ranking tiga besar, agar bisa berkompetisi lebih ideal. Dengan bangsa pasar yang begitu besar di negara kita, sekitar 273 juta penduduk muslim Indonesia, seharusnya kita dapat menjadi negara terbesar se-ASEAN dalam pengelolaan bank syariah,” kata Nevi memaparkan lebih dalam.

Selanjutnya ia menyarankan kepada pihak BUMN, agar bank syariah di bawah naungannya menjadi mandiri tersendiri, bukan sebagai anak perusahaan. Saat ini, bank syariah masih hanya menjadi anak perusahaan bank BUMN konvensional jika tidak ditarik menjadi milik negara. Pemegang saham akan tetap perusahaan BUMN. Pemegang saham Mandiri Syariah adalah Bank Mandiri, BRI Syariah mayoritas pemegang sahamnya Bank BRI, dan BNI Syariah oleh Bank BNI.

“Pemerintah baru-baru ini memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan fasilitas-fasilitas pendanaan untuk bank BUMN sekitar Rp 30 triliun. Seharusnya bank syariah dapat mengakses, namun dikarenakan bukan perusahaan BUMN, melainkan hanya anak perusahaan, maka akan kesulitan dana penyertaan negara tersebut,” tutup Nevi. ■ dep/sf

Pemanfaatan Energi Nuklir saat Ini Hanya untuk Pembangkit Listrik

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa pemanfaatan energi nuklir yang akan dikembangkan di Indonesia saat ini hanya untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Hal tersebut tercantum dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) yang tengah dibahas DPR RI bersama pemerintah.

Demikian diterangkan Eddy dalam Webinar yang diselenggarakan Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian Setjen DPR RI dengan mengangkat tema “Optimalisasi Pengembangan Nuklir dalam Energi Baru dan Terbarukan Menuju Ketahanan Energi Berkelanjutan”, baru-baru ini.

“Saat ini DPR RI bersama pemerintah tengah membahas RUU EBT. Terdapat sejumlah pasal dalam RUU ini, diantaranya Pasal 6 yang menyatakan bahwa sumber energi baru terdiri atas nuklir dan sumber energi baru lainnya. Sementara dalam Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 itu dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi sepenuhnya untuk penggunaan pembangkitan listrik saja,” ujar Eddy dalam paparannya.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul masih adanya pro dan kontra masyarakat terkait pemanfaatan energi nuklir khususnya di Indonesia, dan dunia pada umumnya. Dengan kata lain, isu nuklir ini sudah menjadi isu universal yang kemudian melahirkan isu sosial. Adapun, isu krusial energi nuklir adalah isu operasional (kapasitas dan kompetensi teknis, keselamatan, pemeliharaan, dan pengawasan) dan sosial.

Politisi Fraksi PAN ini menjelaskan, pemanfaatan energi nuklir sejatinya sudah tercantum dalam beberapa Undang-Undang. Sebut saja, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran yang mengatur seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir, mulai dari penguatan kelembagaan, pengusaha, pengawasan pengelolaan limbah radioaktif dan pertanggungjawaban kerugian nuklir. Dalam Pasal 5, pemerintah membentuk majelis pertimbangan tenaga nuklir yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan mengenai pemanfaatan tenaga nuklir.

Tidak hanya itu, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, terutama dalam Pasal 1 ayat 4 disebutkan, sumber energi baru yaitu sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari sumber energi terbarukan, maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hydrogen, gas metana batu bara tercairkan (*coal bead methane*), batu bara tercairan (*liquefied coal*), dan batu bara tergas (*gasified coal*).

Hal tersebut dipertegas lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014. Dimana disebutkan, prioritas pengembangan energi, terutama di Pasal 11 ayat 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dikecualikan bagi energi nuklir yang dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan energi nasional. Dalam skala besar mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi energi baru dan energi terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, serta

mempertimbangkannya sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat.

“Sebenarnya, Indonesia sudah memiliki sejarah panjang mengenai nuklir bahkan sudah memiliki tiga reaktor nuklir yaitu Reaktor Triga mark-Bandung, Kartini-Yogyakarta dan reaktor serbaguna-Serpong. Sehingga perlu adanya payung hukum yang kuat untuk mengakselerasi pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia khususnya energi nuklir,” tambahnya.

Oleh karena itu, pihaknya saat ini tengah menyusun RUU Energi Baru dan Terbarukan dan berharap banyak masukan dan saran dari masyarakat untuk penyempurnaan draf akademik. Baik masukan dari sektor akademik, dunia usaha, dan dari pihak yang berkompeten di dalam teknologi nuklir, termasuk aspek lingkungan hidup, pertambangan dan energi penguasaan lahan dan lain-lain. ■ **ayu/es**



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno. Foto: Jaka/JK

Respon Sikap Presiden Prancis, Masyarakat Diimbau **Tak Perlu Turun ke Jalan**

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendukung rencana masyarakat untuk memboikot produk asal Prancis dalam merespon sikap dan pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Namun, Ace mengimbau agar tidak menurunkan massa ke jalan untuk berdemonstrasi. Sebab Indonesia masih berusaha mengendalikan pandemi Covid-19 dan dikhawatirkan kegiatan tersebut akan meningkatkan jumlah kasus.

“Seruan aksi boikot kita serahkan pada masyarakat sendiri, tetapi soal

aksi turun ke jalan sebaiknya tidak perlu, karena saat ini sedang masa pandemi Covid-19. Kita khawatirkan menimbulkan kerumunan dan menjadi klaster penularan jauh lebih banyak,” kata Ace dalam keterangan rilis yang diterima **Parlementaria**, Senin (2/11).

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu menyatakan sikap Presiden Joko Widodo sudah tepat dan sudah mewakili perasaan masyarakat muslim di Indonesia dengan mengemukakan keras pernyataan Presiden Prancis. Sudah selayaknya sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, Presiden Jokowi menyuarakan sikap kemarahan umat Islam.

”

SERUAN AKSI BOIKOT KITA SERAHKAN PADA MASYARAKAT SENDIRI, TETAPI SOAL AKSI TURUN KE JALAN SEBAIKNYA TIDAK PERLU, KARENA SAAT INI SEDANG MASA PANDEMI COVID-19

“Sikap Presiden RI dan Pemerintah Indonesia yang mengemukakan keras tindakan Presiden Prancis tersebut sudah tepat dan patut kita dukung, setidaknya sikap tersebut merupakan langkah protes atas pernyataan yang tidak sensitif kepada agama Islam,” papar legislator dapil Jawa Barat II itu.

Diketahui, Presiden Prancis Emmanuel Macron menjadi perbincangan di negara muslim terkait pernyataannya yang dianggap menghina Islam. Dalam pidatonya pada awal Oktober lalu, ia mengatakan Islam di seluruh dunia sedang mengalami krisis terkait radikalisme.

Ucapan tersebut dipicu setelah peristiwa pemenggalan kepala seorang guru sejarah, Samuel Paty, dalam perjalanan pulang usai mengajar oleh seorang remaja 18 tahun. Paty sebelumnya telah menunjukkan kartun Nabi Muhammad kepada siswa yang diajarnya sebagai materi pelajaran Kebebasan Berekspresi. ■ tn/es



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: OJJ/JK

Upah Minimum 2021 Tak Naik, Menaker Harus **Pertimbangkan Prinsip Keadilan**

Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari menilai Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah seharusnya mempertimbangkan prinsip keadilan sebelum mengambil keputusan tidak menaikkan upah minimum pekerja pada tahun 2021 mendatang. Menurutnya, Menaker terlalu menggeneralisasikan seolah-olah semua sektor bisnis mengalami kesulitan selama pandemi Covid-19.

“Padahal ada beberapa sektor bisnis yang meraup keuntungan dan dapat dikatakan tetap eksis di masa pandemi Covid-19. Antara lain sektor bisnis makanan dan minuman, penjualan kebutuhan pokok, sektor kesehatan, usaha jasa pendidikan dan pelatihan, bisnis digital, serta agrobisnis,” ujar Lucy dalam siaran persnya kepada *Parlementaria*, Sabtu (31/10)

Ia menambahkan, Menaker seharusnya bisa memilah jenis usaha yang terdampak dan tidak terdampak Covid-19 sebagai pijakan jenis usaha mana saja yang upahnya tetap dan mana

yang dapat dinaikkan. Dengan begitu, keputusan Menaker dapat berlaku secara proporsional. “Saya berharap Menaker mencabut Surat Edaran tersebut dan menggantinya dengan keputusan yang lebih proporsional,” kata Lucy.

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan keputusan naik tidaknya upah minimum juga dapat diserahkan kepada setiap kepala daerah dengan memperhatikan pemetaan perusahaan berdasarkan jenis usaha yang terdampak dan tidak terdampak pandemi Covid-19.

“Menyerahkan (kebijakan upah) kepada Gubernur akan lebih realistis mengingat kadar dampak pandemi Covid-19 di setiap provinsi berbeda, termasuk juga jenis usahanya. Dengan cara itu prinsip keadilan lebih terpenuhi baik bagi pengusaha maupun bagi pekerja,” pungkas Lucy. ■ rnm/es

Anggota Komisi IX DPR RI
Lucy Kurniasari. Foto: Jaka/JK



DPR Tekankan Penerapan Protokol Kesehatan Sektor Pariwisata

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menekankan pentingnya penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan (3M) pada destinasi wisata. Di masa pandemi ini, destinasi wisata juga harus menerapkan pariwisata berbasis *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability* (CHSE).

“Sertifikasi CHSE ini berfungsi sebagai jaminan wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan,” tandasnya pada Bimbingan Teknis (Bimtek) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) dengan tema “Kemitraan Strategi Promosi Pariwisata di Era Adaptasi Kebiasaan Baru” di Garut, Jawa Barat, Rabu (28/10).

Salah satu komitmen yang disepakati bersama yakni membangun kepariwisataan Garut berbasis budaya. Untuk itu, legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat XI yang meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya ini mengajak semua pihak terutama para pemangku kepentingan untuk menjaga ekosistem kepariwisataan yang ada di Garut.

“Semua pihak harus ikut membantu mempromosikan obyek wisata yang ada di Garut ini. Tidak mungkin beban ini diberikan ke dinas pariwisata setempat saja. Kita harus bersama-sama dan nanti difasilitasi oleh Kemenparekraf yang bisa menyampaikan bagaimana promosi, bentuk, metode atau klasifikasi



Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah. Foto: OJ/JK

bagaimana cara menyampaikannya,” kata Ferdi, sapaan akrabnya.

Tak hanya itu, Ferdi juga berharap Bimtek ini memberi gambaran menyeluruh bagaimana nantinya mekanisme *viralisasi* promosi destinasi wisata di Garut. “Kami berharap hal ini menjadi perhatian bersama. Bagaimana pula *co-branding* di Garut ini bisa menjadi daya tarik wisata. Apakah dodol Garut bisa menjadi *co-branding* Kemenparekraf ataukah domba Garut. Ini harus dipikirkan,” ujar Ferdi lebih lanjut.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) ini berharap Kemenparekraf/Baparekraf terus mengawal strategi pemasaran pariwisata Garut. “Mudah-mudahan ke depannya harus dibuat lebih matang dan nanti di tahun 2024 menjadi titik *take off* pariwisata di

Kabupaten Garut,” tutup Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI ini.

Direktur Pemasaran Regional I, Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf, Vinsensius Jemadu menerangkan bahwa, selain promosi digital, salah satu hal yang ditekankan dalam Bimtek ialah penerapan pariwisata berbasis *Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability* (CHSE).

“Saat pandemi seperti ini, CHSE menjadi pedoman wisatawan untuk menentukan destinasi wisata yang akan ditujunya. Pandemi membuat orientasi wisatawan dalam melakukan perjalanan mengalami perubahan drastis. Tak hanya kebutuhan fasilitas pendukung saja, tetapi apakah destinasi wisata sudah berbasis CHSE menjadi pertimbangan penting dan utama,” kata Vinsensius dalam sambutannya. ■ oji/sof

Pemerintah Harus Pikirkan Kebijakan Tambahan untuk UMKM

Kinerja penanganan ekonomi pemerintah saat pandemi Covid-19, mendapat banyak sorotan masyarakat luas, seiring dengan genap setahun usia pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Terkait dengan hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyampaikan pandangannya melalui rilis tertulis kepada awak media, akhir pekan lalu.

Doktor ekonomi Islam dari Universitas Airlangga ini menjelaskan bahwa program-program stimulus penanganan ekonomi saat pandemi Covid-19 terangkum dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan sampai dengan tanggal 30 September 2020, realisasinya baru mencapai 38,6 persen atau setara dengan Rp 258,3 triliun dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp 695,2 triliun.

Adapun rincian realisasinya yakni bidang kesehatan hanya Rp 21,92 triliun atau 25,04 persen dari total pagu Rp 87,55 triliun. Bidang perlindungan sosial realisasinya Rp 157,03 triliun atau 77,1 persen dari total pagu Rp 203,91 triliun. Bidang sektoral kementerian dan lembaga dan Pemda hanya 25 persen atau Rp 26,61 triliun dari total pagu Rp 106,05 triliun. Bidang UMKM realisasinya adalah Rp 84,85 triliun atau 68,7 persen dari pagu Rp 123,47 triliun. Bidang insentif usaha realisasinya Rp 28,7 triliun atau 23,27 persen dari pagu Rp 120,61 triliun. Sedangkan bidang korporasi sampai September 2020 belum terealisasi dari anggaran Rp 53,57 triliun.

Anis mengansumsikan pertumbuhan realisasi hanya mampu mencapai 20 persen per bulan hingga akhir tahun, maka realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini hanya mencapai 50-60 persen. Artinya akan

ada dana lebih dari Rp 300 triliun yang tidak terserap. "Realisasi yang rendah ini menyebabkan tujuan utama adanya Pemulihan Ekonomi Nasional itu belum dapat dinikmati oleh masyarakat. Hal itu tercermin dengan adanya pertumbuhan negatif pada kuartal ke-2 tahun 2020, yaitu mencapai 5,3 persen negatifnya. Dengan angka seperti itu, kuartal ke-3 kita perkiraan masih negatif juga," imbuh Anis.

Menjawab pertanyaan apakah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah sudah cukup optimal membantu pelaku UMKM maupun masyarakat, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memberikan catatannya. "Perlu menjadi catatan bahwa total UMKM yang ada di Indonesia sebanyak 59 juta UMKM. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan hingga April 2020 tercatat terdapat sebanyak 10 juta UMKM yang dikategorikan berpotensi menerima restrukturisasi. Jumlah ini hanya sebesar 16,9 persen

dari total UMKM," papar Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.

Data ini menunjukkan, sebagian besar UMKM masih kesulitan mengakses layanan kredit formal dari perbankan maupun dari lembaga keuangan lain. Hal ini menyebabkan program restrukturisasi kredit UMKM tidak akan membantu sebagian besar UMKM di Indonesia. Oleh sebab itu, menurut Anis, perlu dipikirkan kebijakan tambahan untuk membantu UMKM. "Perlu dipastikan sebanyak 1545 BPR atau BPRS dan koperasi-koperasi juga mendapatkan akses yang adil dalam program restrukturisasi," tegasnya.

Beban tekanan likuiditas dan resiko kredit juga dinilai Anis, lebih besar di BPR atau BPRS. "Sehingga menjadi penting bagi pemerintah untuk memastikan bagaimana mereka dapat menjangkau penempatan dana pemerintah pada bank-bank peserta untuk program restrukturisasi," tutup legislator daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta tersebut. ■ alw/sf



Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto: Arief/JK

Willy Aditya Apresiasi Lomba Orasi Bintang Orator

Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengapresiasi penyelenggaraan Lomba Orasi Bintang Orator (LOBO) oleh Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI. Willy mengungkapkan, lomba tersebut bisa menjadi sarana komunikasi antara DPR RI dengan masyarakat. Bahkan juga sebagai sarana menjangkau saran dan masukan bagi Baleg DPR RI dalam menyusun RUU Perlindungan Data Pribadi yang dijadikan tema lomba kali ini.

“Dari semua peserta memberikan masukan yang sangat berharga bagi DPR RI khususnya Baleg dalam

penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi. Diantaranya masukan yang disampaikan oleh ketiga juara lomba, Sarah, Adnan maupun Habibah,” ujar Willy usai menyerahkan trofi dan sertifikat serta hadiah bagi pemenang Lomba Orasi Bintang Orator (LOBO) DPR RI, di selasar Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (2/11).

Masukan yang diberikan tersebut, lanjut Willy terkait dengan berbagai daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU Perlindungan Data Pribadi. Salah satunya, terkait siapa saja yang secara khusus diberikan hak membuka data pribadi seseorang dengan tujuan tertentu seperti untuk keamanan

negara. Menurut Sarah, yang berhasil meraih peraih juara I LOBO DPR RI, hal tersebut akan menimbulkan multitafsir. Sehingga akan lebih baik jika dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud untuk keamanan negara dan sebagainya.

Lebih dari itu politisi dari fraksi Partai Nasdem ini sangat mengapresiasi kemampuan para peserta LOBO yang notabene merupakan generasi muda, yang penuh dengan gelora, dan pemikiran kritis terhadap berbagai hal yang terjadi dengan bangsa ini. Ia berharap lomba semacam ini bisa dijadikan kesempatan baik bagi generasi muda yang penuh dengan ide dan gagasan tersebut untuk menyampaikan aspirasinya terhadap wakil rakyat di DPR RI.

Sementara itu, Ketua Panitia LOBO DPR RI Muhammad Ilnur Chalid menjelaskan LOBO kali ini merupakan kali kedua yang digelar Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI. Salah satu tujuannya untuk menjembatani masyarakat dengan Dewan, serta untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan tugas dan fungsi DPR.

Dari 72 peserta LOBO yang berasal dari Aceh hingga Papua terpilih 3 juara, yakni Sarah meraih Juara I, Nenden Juara II, dan Adnan Juara III, serta Siti Habibah sebagai juara favorit. Dikarenakan kondisi pandemi Covid-19, Nenden yang merupakan juara ke II berasal dari Jawa Barat berhalangan hadir untuk menerima trofi di DPR RI.

“Trofi, sertifikat pemenang dan hadiah tetap akan kami kirimkan ke rumah masing-masing,” ujar Ical, begitu Ilnur Chalid biasa disapa, seraya menegaskan bahwa acara tersebut akan menjadi acara tetap Setjen DPR RI setiap tahunnya. ■ ayu,mar/es



Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya menyerahkan trofi dan sertifikat pemenang LOBO DPR RI. Foto: Runi/JK

Diapresiasi, Presiden sudah Tandatangani UU Ciptaker

Keputusan Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sangat diapresiasi. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Heri Gunawan menilai, langkah tersebut merupakan keputusan politik yang sangat tepat, karena semua proses politik dalam merumuskan UU tersebut telah selesai.

“Bahwa masih ada pihak yang menolak, saya kira itu hal yang wajar. Namun, hal itu tidak boleh menghambat apa yang menjadi tujuan dari dibuatnya UU dengan konsep *omnibus law* ini, yakni untuk menyerap seluas-luasnya tenaga kerja, sekaligus menjawab permasalahan angka pengangguran yang saat ini masih tinggi,” komentar Hergun, sapaan akrab Heri Gunawan dalam siaran persnya kepada **Parlementaria**, Rabu (4/10).

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan. Foto: Arief/JK



Pada awal tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka pengangguran mencapai 6,88 juta orang. Dengan adanya pandemi Covid-19, Kementerian PPN/Bappenas memprediksi pada 2021 tingkat pengangguran melonjak menjadi 10,7 juta hingga 12,7 juta orang. Sementara strategi penciptaan lapangan kerja melalui UU Ciptaker, jelas Hergun, memprioritaskan UMKM sebagai *leading sector*. Hal ini dapat dilihat dalam konsideran UU Ciptaker bahwa pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan

kepada UMKM diletakkan pada susunan terdepan bersama-sama dengan koperasi.

Kemudian, lanjut politisi Partai Gerindra ini, baru disusul dengan peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. “Prioritas UMKM sebagai *leading sector* mengacu pada data bahwa kontribusinya terhadap PDB mencapai 60,3 persen. Kontribusi UMKM yang besar terhadap perekonomian belum diiringi dengan perhatian yang maksimal terhadap pengembangan UMKM,” ungkap Anggota Komisi XI DPR RI itu.

UU Cipta Kerja dinilai Hergun, hadir untuk membereskan berbagai persoalan klasik yang masih membelit UMKM. Di antaranya mengenai permodalan, perizinan, pemasaran, basis data, dan akses terhadap proyek-proyek pemerintah. “Sekarang, pemerintah tinggal mempercepat pembuatan aturan turunan atau pelaksana dari UU Nomor 11 Tahun 2020 ini. Sehingga, apa yang diharapkan dari hadirnya UU ini bisa segera dieksekusi di lapangan,” tutupnya. ■mh/sf

Tugas Perisalah Penting dalam Persidangan

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti menegaskan, tugas perisalah sangat penting dalam mendukung kinerja kedewanan, penguatan terhadap institusi dan kelembagaan parlemen. Saat ini, tugas tersebut sudah diperkuat lagi dengan aturan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Hal tersebut diungkapkan Novita saat menjadi narasumber utama dalam *Forum Group Discussion* (FGD) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (2/11), membahas tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif dan Asisten Perisalah Legislatif untuk Mendukung Tugas Kedewanan

“Perisalah ini menjadi tugas yang sangat penting dalam persidangan, menjadi penguatan. Perisalah menjadi bagian penting dalam mendukung kinerja kedewanan, penguatan terhadap institusi dan kelembagaan parlemen. Tugasnya diperkuat dengan lahirnya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2019,” papar Novita di hadapan para perisalah.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu juga menjelaskan, melalui Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib pada paragraf 8 berkenaan dengan risalah, catatan rapat, dan laporan singkat pada pasal 301 ayat 1 telah mengatur untuk setiap rapat paripurna, rapat paripurna luar biasa, rapat panitia kerja atau tim, rapat kerja, rapat dengar pendapat, dan rapat dengar pendapat umum dibuat risalah yang ditandatangani oleh ketua rapat/ sekretaris rapat atas nama ketua rapat.

Acara ini dibuka oleh Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Damayanti. Dia mengungkapkan,

”

PERISALAH MENJADI BAGIAN PENTING DALAM Mendukung KINERJA KEDEWANAN, Penguatan TERHADAP INSTITUSI DAN KELEMBAGAAN PERLEMEN

perisalah legislatif berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang risalah legislatif dan asisten perisalah legislatif pada Sekretariat Jenderal DPR RI, MPR RI, dan DPD RI. “Kami Setjen DPR RI menjadi instansi Pembina. Nanti seluruh perisalah dari DPRD akan meminta ‘persetujuan’ untuk ke jenjang selanjutnya. Karena kita inisiatornya, kita menjadi instansi pembina untuk seluruh Indonesia,” ungkap Maya.

Karena Setjen DPR RI menjadi instansi pembina, lanjut Maya, sudah ada beberapa DPRD yang mengajukan diri untuk bergabung, misalnya dari DPRD Aceh, kemudian Papua dan Papua Barat, ada juga dari DPRD Kabupaten atau Kota Riau dan Rejang Lebong. “Kita mempunyai dua jabatan fungsional buat perisalah, untuk yang ahli dan satu lagi yang terampil. Kegiatannya menyusun risalah rapat, penyusunan dokumen risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi risalah rapat dan pengembangan risalah rapat legislasi,” jelas Maya. ■ eko/es



Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti. Foto: Jaka/JK

Peserta Parlemen Remaja 2020 Harus Perkuat Wawasan Kebangsaan



Anggota BURT DPR RI Paramitha Widya Kusuma. Foto: Azka/JK

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Paramitha Widya Kusuma meminta kepada segenap generasi muda penerus bangsa, khususnya pada seluruh peserta Parlemen Remaja tahun 2020 terus bertumbuh kembang dalam hal wawasan kebangsaan nan Pancasila.

Terlebih, pada era disrupsi deras arus informasi harus betul-betul bijak dalam menyerap pemberitaan, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh hoaks. Hal itu diungkapkan Paramitha saat diwawancarai *Parlementaria* usai menjadi narasumber dalam rangkaian acara Parlemen Remaja 2020 Parlemen Remaja 2020 secara *virtual*, di Jakarta, Senin (2/11).

“Remaja adalah tahapan emas sebuah perkembangan pribadi terutama dalam hal wawasan kebangsaan nan Pancasila. Maka, terutama di tengah era disrupsi generasi muda harus menjadi pribadi yang bijak dalam menyerap pemberitaan, terlebih pada kemajuan teknologi informasi begitu pesat saat-saat ini,” ujar Paramitha.

Tak hanya itu, politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut menyarankan kepada segenap generasi muda peserta Parlemen Remaja 2020 untuk tidak pernah berhenti untuk belajar dan terus membaca berbagai ilmu pengetahuan terus membuka wawasan. Serta, berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitar peserta Parlemen Remaja 2020.

”

DI TENGAH ERA DISRUPSI, GENERASI MUDA HARUS MENJADI PRIBADI YANG BIJAK DALAM MENYERAP PEMBERITAAN TERLEBIH PADA KEMAJUAN TEKNOLOGI INFORMASI BEGITU PESAT SAAT-SAAAT INI

“Pesan saya kepada seluruh peserta Parlemen Remaja tahun 2020 jangan pernah berhenti untuk belajar, terus membaca dan terus membuka wawasan serta berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Sehingga, dapat membentuk suatu karakter generasi muda intelektual yang arif dan bijaksana. Sebab, masa depan bangsa Indonesia ada dalam genggaman pemuda-pemudi Indonesia,” ungkapnya.

Di sisi lain, Paramitha mengingatkan seluruh peserta Parlemen Remaja 2020 dapat menjadi teladan dalam menjalankan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. “Yakni dengan terus konsisten menerapkan perilaku 3M yaitu menjaga jarak fisik, mencuci tangan dengan sabun secara berkala dan menggunakan masker dalam rangka mencegah pandemi Covid-19 yang masih melanda Indonesia dan dunia,” pungkas Paramitha. ■ pun/sf

Parlemen Remaja 2020 Fokus Bahas UU Kekarantinaan Kesehatan

Sekretaris Jenderal Indra Iskandar menyatakan fokus substansi yang dibahas dalam kegiatan Parlemen Remaja tahun 2020 adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Indra mengungkapkan, peserta Parlemen Remaja 2020 berjumlah 134 pelajar yang berasal dari seluruh SMA/SMK/MA dari 80 daerah pemilihan (dapil) di Indonesia. “Parlemen Remaja 2020 merupakan wadah pembelajaran demokrasi bagi masyarakat khususnya bagi generasi muda. Parlemen Remaja 2020 diselenggarakan dengan tema ‘Gotong Royong Mengatasi Pandemi Covid-19 Optimis Kita Bisa’ Adapun, substansi yang dibahas yaitu penyusunan RUU tentang perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan,” jelas Indra usai pembukaan Parlemen Remaja 2020, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (2/11).

Pada pembukaan Parlemen Remaja 2020 yang dihadiri Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani secara *virtual* itu, Indra menyatakan Parlemen Remaja 2020 digelar melalui proses seleksi yang sangat ketat. Yakni, dengan penilaian yang mempertimbangkan beberapa aspek penilaian seperti penilaian prestasi akademik dan non akademik, keaktifan dalam berorganisasi, pembuatan video kampanye dan penulisan esai.

Indra mengungkapkan, video kampanye merupakan prasyarat



Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Foto: Azka/JK

dalam proses seleksi, dengan peserta membuat video singkat berdurasi kurang lebih 3 menit bertema ‘Jika saya menjadi legislator apa yang akan dilakukan dalam menangani pandemi Covid-19’ yang diunggah pada akun media sosial calon peserta yaitu di YouTube atau di Instagram. Selain untuk mengukur kemampuan peserta dalam mengekspresikan gagasan, juga untuk melihat kemampuan *public speaking* yang baik.

“Di sisi lain, kriteria yang merupakan penilaian tertinggi dalam proses seleksi yaitu penulisan esai. Penulisan esai untuk mengukur kapabilitas dan kekritisan Parlemen Remaja dengan tema ‘Gotong Royong Mengatasi Pandemi Covid-19, Optimis

Kita Bisa’. Pengumpulan esai peserta terpilih nanti akan dibukukan dalam buku kumpulan esai anggota Parlemen Remaja tahun 2020 yang akan diberikan kepada Pimpinan DPR RI,” tutup Indra.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani secara resmi membuka rangkaian acara Parlemen Remaja tahun 2020 yang berlangsung pada 2-6 November 2020 ini ditandai dengan penyetoran palu sidang. Pada sambutannya secara virtual, politisi PDI-Perjuangan itu mengungkapkan melalui kegiatan simulasi nantinya segenap peserta Parlemen Remaja dapat mengetahui seluruh kinerja, tugas dan fungsi DPR RI. ■ pun/sf

Puslit DPR Gelar Webinar Urgensi Hasil Penelitian dalam Pembentukan UU

Pusat Penelitian (Puslit) Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung menyelenggarakan webinar nasional dengan tema “Urgensi Hasil Penelitian Dalam Pembentukan Undang-undang”. Kepala Puslit BK DPR RI Indra Pahlevi mengatakan, webinar tersebut dilaksanakan atas dasar kebutuhan Puslit BK DPR RI dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UPI dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan.

“Kegiatan ini tentu adalah bagian dari tugas fungsi kami di Badan Keahlian, khususnya Pusat Penelitian yang salah satu tugasnya adalah mendukung bagaimana kita memberikan masukan berdasarkan hasil penelitian atau kajian dalam pembentukan undang-undang. Sehingga dalam menyusun sebuah RUU tentu harus berdasarkan suatu kajian akademik sehingga dokumennya

pun harus lengkap,” jelas Indra usai mengikuti webinar yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/11).

Dalam penyusunan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU), lanjut Indra, pentingnya keberadaan latar belakang akademik, sehingga nantinya Undang-Undang (UU) yang dihasilkan berdasarkan *evidence*, bukti, dan kajian empirik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Indra mengaku setiap awal tahun, Puslit rutin menyampaikan surat kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) khususnya Komisi di DPR RI, terkait dengan topik penelitian yang dibutuhkan guna sebagai bahan penelitian.

“Topik penelitian tersebut kami terima sebagai bahan kami melakukan penelitian dan hasilnya akan kami sampaikan (kepada AKD). Penelitian tidak hanya untuk satu RUU yang akan dibentuk, tapi bisa juga evaluasi terhadap UU yang sudah berlaku, apa kekurangan dan yang perlu diperbaiki. Bisa juga terkait isu suatu perundangan-

undangan ataupun isu-isu penting lain yang dibahas di AKD, kita saling *support*,” ungkap Indra.

Lebih lanjut Indra menambahkan, Puslit juga memberikan masukan tertulis dan ikut dalam proses pembahasan RUU, mulai dari penyusunan hingga proses pembahasan. Dalam proses pembahasan dengan pemerintah, Puslit terus memberikan masukan berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan oleh Puslit dan mengakomodir semua stakehokders yang terlibat dalam proses pembahasan suatu UU. Bahkan Indra mengaku, pernah terlibat langsung dalam kajian yang disampaikan dan di-*adopt* di dalam UU.

“Tidak jarang kami juga dimintai pandangannya secara internal terkait isu di dalam suatu pasal. Apa yang kami sampaikan tentu tidak semuanya di-*adopt* karena belum tentu juga apa yang menurut kita baik, belum tentu baik pula menurut para Anggota DPR dan masyarakat. Tetap disesuaikan sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” imbuh Indra menutup pernyataannya. ■ tra/sf



Foto bersama Wakil Ketua BURT DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah, Sekjen DPR RI Indra Iskandar, dan jajaran Puslit BK DPR RI. Foto: Hendra/JK

Koordinatoriat Wartawan Parlemen Harus Sajikan Berita **secara Imbang**

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengharapkan kerja sama antara DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen terus disinergikan dan ditingkatkan. Menurutnya, hubungan kerja antara kesetjenan DPR RI, Anggota DPR RI, dengan para awak media tidak sekedar hanya hubungan profesionalisme kerja tapi sudah seperti keluarga besar.

Dia pun meminta agar dalam penulisan berita tentang kegiatan di DPR RI disiarkan secara berimbang dan objektif. "Tapi pada saat yang pantas diberikan apresiasi maka berikanlah penulisan yang sama dan berimbang," harap Indra saat menyampaikan sambutan pada acara silaturahmi dan diskusi Koordinatoriat Wartawan Parlemen

di Wisma Griya Sabha DPR RI, Kopo, Bogor, Selasa (3/11) malam.

Dia pun menyampaikan, saat ini kesetjenan DPR RI terus berusaha memberikan fasilitas yang baik dan pantas bagi para pewarta yang bertugas meliput aktivitas di komplek parlemen. "Prinsipnya kami akan memfasilitasi karena itu memang tugas kami. Kerja sama ke depan, Sekretariat Jenderal DPR RI dengan teman-teman media perlu terus kita tingkatkan," papar Indra kepada para wartawan.

Dijelaskan Indra, forum komunikasi sosialisasi program kerja DPR RI dengan para pewarta parlemen ini merupakan salah satu media dalam rangka memupuk silaturahmi antara pimpinan dan Anggota Dewan serta Sekretariat Jenderal dengan para jurnalis peliput yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen. "Saya harapkan pertemuan ini berlangsung dengan lancar dan aman dengan menerapkan protokol kesehatan," pungkas Indra. ■ eko/es

Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Foto: Andri/UK

”

PRINSIPNYA KAMI AKAN MEMFASILITASI KARENA ITU MEMANG TUGAS KAMI. KERJA SAMA KE DEPAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DENGAN TEMAN-TEMAN MEDIA PERLU TERUS KITA TINGKATKAN





Wakil Ketua BURT DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah (tengah) menghadiri forum silaturahmi Koordinatoriat Wartawan Parlemen. Foto: Andri/JK

DPR dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen Harus Bersinergi

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah menjelaskan, para wartawan yang bertugas di lingkungan DPR RI merupakan aparat non-organik, yang idealnya harus bersinergi juga mengemban tanggung jawab untuk menyiarkan berita secara berimbang, objektif dan berdampak positif.

Pernyataan tersebut disampaikan Dimiyati saat membuka acara silaturahmi Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Pimpinan BURT beserta Sekretariat Jenderal DPR RI di Wisma Griya Sabha DPR RI, Kopo, Bogor, Selasa (3/11) malam.

“Saya mengingatkan dalam struktur organisasi di DPR RI, ada aparat yang bersifat organik yang dipimpin oleh Pak Sekjen dan juga ada yang anorganik diantaranya adalah teman-teman

wartawan *press room* (Koordinatoriat Wartawan Parlemen). Mau tidak mau ada dalam batang tubuh DPR RI. Kehidupannya ada dalam DPR itu, harus saling berfungsi dan bermanfaat serta bersinergi,” jelas Dimiyati.

Oleh sebab itu dia berharap para wartawan yang bertugas meliput kegiatan di lingkungan DPR RI, turut serta mengemban tugas promotif, protektif, dan kuratif terhadap DPR RI. Dimiyati menjelaskan promotif yang dia maksud adalah mempromosikan sisi positif DPR RI secara berimbang.

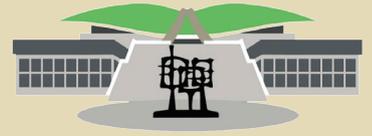
Sedangkan protektif adalah melakukan protektif terhadap parlemen. “Jadi harus protektif kalau ada yang menginformasikan tentang jeleknya parlemen maka saudara-saudara yang harus memprotek lewat tulisan,” ujar politikus Fraksi PKS itu.

Adapun kuratif yang dimaksud Dimiyati adalah, upaya untuk

mengevaluasi secara konstruktif jika ada permasalahan yang membutuhkan pembenahan. “Kalau DPR RI terkena serangan informasi yang tidak berimbang maka obati,” terang wakil rakyat dari dapil Banten I itu.

Dia juga mengungkapkan bahwa selama ini Pimpinan BURT DPR RI selalu mengayomi dan memperhatikan kesejahteraan para pewarta di parlemen. Meskipun demikian dia berharap di antara para anggota Koordinatoriat Wartawan Parlemen tidak menjadi parasit yang ada di internal DPR.

“Saya *warning*, saya ingatkan sekali lagi, kalau saudara menjadi parasit di dalam DPR RI, tidak segan-segan saya minta dicabut ID-nya. Kalau mau teriak-teriak di luar, jangan di dalam. Kalau di dalam, sama saja dengan parasit. Kritik boleh, menginformasikan kebaikan boleh tapi jangan membunuh parlemen,” pesan Anggota Komisi III DPR RI itu. ■ eko/es



Suasana pembukaan kegiatan Parlemen Remaja 2020 secara virtual yang diselenggarakan Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Jenderal DPR RI, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (2/11). Foto: Azka/MAN



Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Achmad Dimiyati Natakusumah saat membuka acara silaturahmi Koordinatoriat Wartawan Parlemen dengan Pimpinan BURT beserta Sekretariat Jenderal DPR RI di Wisma Griya Sabha DPR RI, Kopo, Bogor, Selasa (3/11). Foto: Andri/MAN



Suasana pelepasan tiga PNS Setjen DPR RI yang memasuki masa pensiun per 1 November oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar beserta jajaran, di Ruang Rapat Setjen DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/10). Foto: Runi/MAN

